



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2022	Hal.: 4																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Tunda Bangun Jalan

Bika-Embaloh

■ Pemkab Terbentur Aturan Pusat

KAPUAS HULU, TRIBUN

- Untuk pembangunan infrastruktur ruas jalan dari Desa Mandai Kecamatan Bika ke Kecamatan Embaloh Hilir pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui tidak dapat merealisasikannya atau menundanya sementara.

Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, saat membuka acara pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa se Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, di MABM Kapuas Hulu, Selasa (6/12).

"Mengapa tidak bisa teralisasi karena terbentur dengan kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat yaitu peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor s-173/pk/2022 tentang penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2023," terangnya.

Aturan itu mengamanatkan bahwa kewajiban seluruh pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menyesuaikan prioritas sebagaimana dalam dana alokasi umum (DAU) yang telah ditentukan peruntukannya (spesipic grant) pada APBD tahun 2023.



Jadi Pemkab kesulitan menentukan pembangunan sesuai program yang disampaikan masyarakat dan disepakati bersama dewan, utamanya tentang pembangunan infrastruktur.

Fransiskus Diaan
Bupati Kapuas Hulu

"Jadi Pemkab kesulitan menentukan pembangunan sesuai program yang disampaikan masyarakat dan disepakati bersama dewan, utamanya tentang pembangunan infrastruktur," ucapnya.

Bupati menuturkan, Kapuas Hulu ini luas butuh koneksi infrastruktur antar desa dan kecamatan, sehingga semua usulan desa lewat Musrenbang di awal tahun 2022.

infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya. Namun PMK membuat anggaran tersebut bergeser. "Kalau tidak patuh pada PMK, DAU akan ditunda, belum lagi sanksi lain," ucapnya.

Maka dari itu Bupati Kapuas Hulu meminta kepada camat dan kades, agar membantu pemerintah daerah Kapuas Hulu, untuk menyampaikan ke masyarakat, usulan masyarakat tidak dapat tertampung karena ada aturan dari Pemerintah Pusat.

"Mudah-mudahan tahun 2024 tidak ada lagi hambatan, agar bisa fokus kembali ke pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Fransiskus Diaan, menjelaskan berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, nomor s-173/pk/2022 tentang penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2023, mengamanatkan bahwa kewajiban seluruh pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menyesuaikan prioritas sebagaimana dalam dana alokasi umum (DAU) yang telah ditentukan peruntukannya (spesipic grant) pada APBD tahun 2023.

Padahal, kata Fransiskus Diaan, pembangunan jalan menuju Kecamatan Embaloh Hilir, sudah masuk rencana kerja Pemkab Kapuas Hulu 2023, dan termasuk pembangunan beberapa jalan lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu

"Tapi apa daya dengan adanya aturan baru dari PMK muncul di September 2022 dan merubah program pembangunan yang telah dibahas sebelumnya," ujarnya.

Pemkab dan DPRD rencananya menganggarkan Rp 100-an miliar untuk in-

"Di mana surat dirjen tersebut penekanan prioritas kepada bidang pendidikan lebih besar dibandingkan bidang pekerjaan umum dan kesehatan," ujarnya. (rul)